

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT BANDAR LAMPUNG
TERHADAP PERNYATAAN MENTERI KEUANGAN TENTANG GURU
DAN DOSEN SEBAGAI BEBAN ANGGARAN NEGARA SERTA
IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN**

TUGAS INDIVIDU

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Metode Penelitian Administrasi Publik



Oleh:

Qinayah Asysyra 2456041038

Mandiri B

Dosen Pengampu:

Prof. Intan Fitri Meutia, M.A., Ph.D.

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan fondasi utama untuk membentuk manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global serta mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencetak generasi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sekaligus membentuk karakter dan moral yang baik. Kualitas pendidikan yang baik akan menjadikan suatu bangsa menciptakan tenaga kerja yang kompeten, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing nasional di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya. Pendidikan menjadi media penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga matang secara etika dan moral (Wijaya et al., 2024).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan adalah kunci untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi maupun dinamika sosial. Meningkatnya kompetensi masyarakat, akan menciptakan tenaga kerja yang lebih profesional, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam memperluas akses kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga tercipta pemerataan kesempatan belajar yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kualitas pelayanan pendidikan yang baik akan memengaruhi motivasi guru dan tenaga pendidik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses belajar-mengajar,

yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan (Leuwol et al., 2020).

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dengan memberikan alokasi anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, termasuk untuk gaji guru dan dosen, sarana-prasarana, serta berbagai program pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4), negara diwajibkan mengutamakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional terpenuhi. Anggaran ini meliputi beberapa komponen, seperti gaji tenaga pendidik dan kependidikan, biaya operasional satuan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta program peningkatan mutu pendidikan (Afkar et al., 2020). Alokasi anggaran pendidikan sering menghadapi kendala, misalnya ketidakpatuhan terhadap ketentuan 20% dan dominasi belanja untuk gaji, yang mengurangi fleksibilitas untuk program-program non-gaji yang penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran menjadi krusial agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Belakangan ini, Menteri Keuangan menyatakan bahwa guru dan dosen dianggap sebagai “beban anggaran negara”, pernyataan yang menimbulkan kontroversi di kalangan publik dan media. Hal tersebut memicu perdebatan terkait peran guru dan dosen, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap kualitas dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai persepsi masyarakat terhadap profesi guru dan dosen, serta bagaimana pandangan tersebut berdampak pada motivasi tenaga pendidik dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Fenomena inilah yang menjadi fokus penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Bandar Lampung terhadap pernyataan Menteri

Keuangan serta implikasinya terhadap pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di wilayah tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, pada tahun 2024, terdapat 37 perguruan tinggi yang tersebar di kota ini, menjadikannya pusat pendidikan tinggi utama di provinsi ini. Namun, meskipun jumlah perguruan tinggi cukup banyak, kualitas pendidikan di Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, yang pada akhir 2024 tercatat sebesar 73,13, terendah di antara seluruh provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak institusi pendidikan, kualitas pendidikan dan kesejahteraan manusia di daerah ini masih perlu ditingkatkan (Amanda & Samsuddin, 2025). Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan, seperti keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik, dan belum meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah. Tantangan-tantangan ini turut mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan di Kota Bandar Lampung.

Persepsi masyarakat Bandar Lampung terhadap pernyataan Menteri Keuangan ini berpotensi memengaruhi motivasi guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya. Guru dan dosen yang mengetahui adanya pandangan negatif dari pejabat publik atau masyarakat mengenai profesi mereka dapat merasa kurang dihargai, sehingga semangat kerja dan dedikasi dalam proses pembelajaran menurun. Penurunan motivasi ini tidak hanya berdampak pada kualitas pengajaran, tetapi juga pada kreativitas dan inovasi dalam merancang metode pembelajaran yang efektif. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pelayanan pendidikan, karena tenaga pendidik yang

kurang termotivasi cenderung memberikan kontribusi yang minimal terhadap pencapaian kualitas pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi.

Persepsi negatif masyarakat terhadap guru dan dosen sebagai “beban anggaran” dapat memengaruhi tingkat partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Ketika masyarakat meragukan profesionalisme dan peran guru/dosen, keterlibatan mereka dalam mendukung kegiatan sekolah, mendampingi anak belajar, atau berpartisipasi dalam program-program sekolah berbasis komunitas cenderung menurun. Berkurangnya partisipasi ini mengurangi sinergi antara sekolah dan masyarakat, yang sejatinya penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sebaliknya, persepsi yang positif dan penghargaan terhadap guru dan dosen dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sehingga program pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak pada pencapaian mutu pendidikan yang lebih baik.

Persepsi masyarakat juga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi pendidikan di Kota Bandar Lampung. Jika masyarakat menilai guru dan dosen kurang dihargai atau dianggap beban negara, kepercayaan terhadap sekolah dan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dapat menurun. Kepercayaan yang menurun ini berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kurikulum, metode pengajaran, dan hasil pendidikan yang diberikan. Sebaliknya, penghargaan terhadap tenaga pendidik akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi pendidikan, memotivasi guru/dosen untuk bekerja lebih optimal, dan mendorong partisipasi orang tua serta warga dalam proses belajar-mengajar. Persepsi masyarakat terhadap pernyataan Menteri Keuangan memiliki implikasi nyata terhadap kualitas dan keberlanjutan pelayanan pendidikan di Bandar Lampung.

Fokus penelitian ini dibatasi pada persepsi masyarakat Bandar Lampung terhadap pernyataan Menteri Keuangan mengenai guru dan dosen sebagai “beban anggaran negara” serta implikasi nyata dari persepsi tersebut terhadap

kualitas pelayanan pendidikan. Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan masyarakat, motivasi guru dan dosen dalam melaksanakan tugasnya, serta interaksi antara guru/dosen dengan siswa di kelas. Penelitian juga memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua dalam kegiatan pendidikan, mengingat keterlibatan mereka merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pelayanan pendidikan. Dengan membatasi fokus pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak pernyataan Menkeu terhadap kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung, tanpa melebar ke isu kebijakan makro atau anggaran secara keseluruhan.

Penelitian ini penting karena persepsi masyarakat dapat memengaruhi motivasi guru dan dosen, interaksi dengan siswa, serta partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, yang pada gilirannya berdampak langsung pada efektivitas proses belajar-mengajar. Penelitian ini memberikan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, sekolah, dan perguruan tinggi mengenai bagaimana pandangan publik terhadap tenaga pendidik dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan kebijakan, peningkatan dukungan masyarakat, serta strategi untuk memperkuat peran guru dan dosen dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muawanah et al., 2022 berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Pendidikan Madrasah di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan di madrasah di Jawa Tengah secara umum berada dalam kategori baik. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi layanan pendidikan yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan, yang

relevan dalam persepsi terhadap profesi guru dan dosen sebagai "beban anggaran negara".

Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Febriyanti Ardina et al., (2025) yang membahas persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan skeptis bahkan negatif terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap menurunkan kualitas pelayanan pendidikan serta tidak menjamin pemerataan akses maupun partisipasi masyarakat. Temuan ini menekankan bagaimana persepsi negatif terhadap kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan insight yang sangat berharga dalam memahami implikasi persepsi masyarakat terhadap pernyataan Menkeu dan pelayanan pendidikan di Bandar Lampung.

Secara teoritis, penelitian ini berupaya mengisi celah literatur mengenai keterkaitan antara persepsi masyarakat terhadap pernyataan pejabat publik dengan implikasinya pada sektor pendidikan. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih banyak membahas isu kebijakan anggaran pendidikan dari sisi makro, seperti proporsi anggaran atau efektivitas program, tetapi belum banyak yang menelaah bagaimana pernyataan pejabat publik memengaruhi cara masyarakat memandang profesi guru dan dosen. Dengan menggunakan landasan teori persepsi sosial, penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat menafsirkan, menilai, dan merespons informasi yang mereka terima. Teori kebijakan publik digunakan untuk memahami bagaimana persepsi yang terbentuk dapat berdampak pada legitimasi kebijakan, penerimaan publik, dan keberlanjutan pelayanan pendidikan.

Secara empiris, penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena aktual yang terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu reaksi masyarakat terhadap pernyataan Menteri Keuangan mengenai guru dan dosen yang dikategorikan sebagai "beban anggaran negara". Fenomena tersebut menjadi menarik karena tidak hanya memunculkan perdebatan di ruang publik nasional, tetapi juga menimbulkan

resonansi yang cukup kuat di tingkat lokal, khususnya pada masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan dunia pendidikan. Reaksi yang muncul memperlihatkan adanya keresahan di kalangan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, yang merasa profesinya terpinggirkan dan kurang dihargai. Selain itu, terdapat indikasi perubahan cara pandang masyarakat terhadap profesi pendidik yang sebelumnya dipandang sebagai profesi mulia, kini mulai dipertanyakan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa.

Kondisi ini juga berimplikasi pada potensi turunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, terutama ketika narasi yang berkembang di masyarakat mengarah pada anggapan bahwa tenaga pendidik tidak lagi menjadi aset strategis bangsa, melainkan beban negara. Situasi tersebut dapat memengaruhi semangat kerja para pendidik, motivasi generasi muda untuk menekuni profesi guru atau dosen, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan secara umum. Penelitian ini relevan dilakukan karena mampu memberikan gambaran empiris tentang bagaimana sebuah pernyataan dari pejabat publik dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, memengaruhi opini masyarakat, serta menguji ketahanan nilai-nilai penghargaan terhadap profesi pendidik di tingkat lokal..

Berdasarkan masalah diatas maka penelitian ini fokus pada analisis persepsi masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut guru dan dosen sebagai “beban anggaran negara”. Fokus ini dipilih karena pernyataan tersebut menimbulkan respon yang beragam di masyarakat, yang berpotensi memengaruhi citra profesi guru dan dosen, serta berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di tingkat lokal. Penelitian ini dibatasi pada aspek persepsi masyarakat, implikasi terhadap motivasi guru/dosen, serta konsekuensinya terhadap kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan di Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut guru dan dosen sebagai “beban anggaran negara” menimbulkan kontroversi dan berpotensi

memengaruhi pandangan masyarakat. Penelitian tentang persepsi masyarakat dan dampaknya pada pelayanan pendidikan masih terbatas. Berdaraskan hal tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Bandar Lampung terhadap pernyataan Menkeu yang menyebut guru dan dosen sebagai beban anggaran negara?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tersebut berdampak pada pelayanan pendidikan, termasuk motivasi guru/dosen dan partisipasi masyarakat?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Bandar Lampung terhadap pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut guru dan dosen sebagai beban anggaran negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat tersebut berdampak pada pelayanan pendidikan, khususnya terkait motivasi guru dan dosen dalam melaksanakan tugasnya serta partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pendidikan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Teoritis/

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap pernyataan pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang ilmu sosial dan kebijakan publik, terutama mengenai bagaimana opini dan persepsi masyarakat dapat memengaruhi keberlangsungan pelayanan pendidikan. Jika pertanyaan penelitian yang diajukan dapat terjawab, maka hasilnya dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori persepsi sosial dalam pendidikan serta memperkuat pemahaman tentang keterkaitan antara kebijakan publik, opini masyarakat, dan kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi,

maupun peneliti lain yang ingin mengkaji isu-isu serupa pada daerah atau fenomena yang berbeda.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, khususnya pemerintah pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan dan strategi komunikasi publik yang lebih efektif terkait profesi guru dan dosen. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat motivasi guru dan dosen, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa guru dan dosen bukan sekadar bagian dari beban anggaran, melainkan aset penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini dapat mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk lebih menghargai peran tenaga pendidik dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian yang berangkat dari fenomena pernyataan Menteri Keuangan mengenai guru dan dosen sebagai beban anggaran negara. Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain untuk memperkuat landasan teori dan kerangka konseptual. Dari hasil kajian ini, peneliti menyusun proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hingga metode yang akan digunakan.

2. Tahap Persiapan Lapangan

Setelah proposal disetujui, peneliti menyiapkan instrumen penelitian, seperti pedoman wawancara, daftar pertanyaan, dan format observasi. Peneliti juga menentukan lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung serta memilih informan yang relevan, yaitu masyarakat, guru, dan dosen serta mahasiswa calon guru. Tahap ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Bandar Lampung untuk mengetahui persepsi mereka, serta kepada guru dan dosen untuk melihat implikasi terhadap motivasi dan kualitas pelayanan pendidikan. Observasi dilakukan di lingkungan pendidikan, sedangkan dokumentasi diperoleh dari arsip, berita, maupun dokumen resmi terkait isu pendidikan.

4. Tahap Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan tiga langkah utama, yaitu reduksi data (memilah data sesuai fokus penelitian), penyajian data (mengorganisasikan data dalam bentuk narasi atau tabel), serta penarikan kesimpulan (mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data). Pendekatan analisis tematik digunakan untuk menemukan kategori utama, seperti persepsi positif, negatif, dan implikasi terhadap pelayanan pendidikan.

5. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah analisis selesai, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi. Laporan berisi uraian lengkap mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil temuan, hingga kesimpulan dan saran. Tahap ini merupakan akhir dari proses penelitian sekaligus bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, R., Luque, J., Nomura, S., & Marshall, J. (2020). *Mengungkap Bagaimana Pemerintah Daerah Di Indonesia Membelanjakan Dana Anggaran Mereka Untuk Pendidikan*. Bank Dunia (World Bank Publication). Washington.
- Amanda, & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Provinsi Lampung. *Identik: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 2(3), 97–103.
- Febriyanti Ardina, Aulia Annisa, Anggitasari Syahrani, Muzhaffar Ramzi Zahid, & Nugraha Joko Tri. (2025). Efisiensi Anggaran Di Era Pemerintahan Baru: Persepsi Mahasiswa Terhadap Dampaknya Bagi Pendidikan Dan Kesejahteraan. *Fisipublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 10(1), 15–25.
- Leuwol, N. V., Wula, P., Purba, B., Marzuki, I., Brata, D. P. N., Efendi, M. Y. M., Sahri, Ahdiyati, M., Sari, I. N., Gusty, S., Nugraha, N. A., Bungin, E. R., Purba, B., & Anwar, A. F. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Muawanah, S., Sofanudin, A., Wahab, W., Taruna, M. M., Wibowo, A. M., Muzayanah, U., Atmanto, N. E., & Muntakhib, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Pendidikan Madrasah Di Jawa Tengah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 20(1), 41–58.
- Wijaya, C., Siregar, M. F. Z., Iman, M., Siregar, A. H., & Fahada, N. (2024). *Membangun Pendidikan Berkualitas: Analisis Dan Inovasi Kebijakan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.